

## Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Produk Domestik Bruto Dengan Variabel Intervening Pengeluaran Barang dan Jasa di Indonesia

Jufri Jacob<sup>1</sup>, Abd. Chalid Ahmad<sup>2</sup>, Machmud Arifin<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Khairun University Postgraduate, Ternate, Indonesia

<sup>2</sup> Khairun University Postgraduate, Ternate, Indonesia

<sup>3</sup> Khairun University Postgraduate, Ternate, Indonesia

Corresponding Author: [jufrijacob@unkhair.ac.id](mailto:jufrijacob@unkhair.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i2.476>

### Article Info

#### Article History;

Received:

2024-11-25

Revised:

2024-12-20

Accepted:

2024-12-30

**Abstrak:** Penerimaan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang tidak berasal dari transfer pemerintah pusat. Pendapatan ini mencerminkan kemandirian ekonomi yang diperoleh dari kekayaan wilayah tersebut. Penerimaan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagian dari pengeluaran ini diarahkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui pengadaan barang/jasa, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Studi ini meneliti 34 provinsi di seluruh Indonesia, menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data yang dikumpulkan diproses menggunakan analisis regresi panel. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah melalui realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Kata kunci:** Kebijakan Fiskal, PDRB, Pengadaan Publik, Uji Sobel.

## PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke-4 terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Tidak hanya dari segi jumlah penduduk, Indonesia juga merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas, menjadikannya negara dengan potensi ekonomi yang besar. Hal ini bukan hanya pendapat penulis, pada tahun 2022, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 20 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia (2023). Indonesia berada di peringkat ke-17 dengan PDB sebesar US\$1,29 triliun.

Selain itu, menjelang peringatan seratus tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target dan rencana kebijakan untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Indonesia diprediksi akan memasuki era keemasan pada tahun 2045 karena pada tahun 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jika hal ini

dimanfaatkan dengan baik, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk secara signifikan.

Dari tahun 2018 hingga 2023, PDB per kapita Indonesia terus meningkat dari 56 juta rupiah menjadi 75 juta rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 3,8%. Namun, pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh wabah pandemi di tahun 2019-2020 yang memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mencapai tujuan ekonomi Indonesia pada tahun 2045, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi, termasuk mendorong perekonomian nasional melalui belanja pemerintah dan investasi asing.

Menurut Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2022 oleh Bank Indonesia (2024), pengeluaran pemerintah telah meningkat. Hingga Maret 2022, pendapatan pemerintah daerah di Indonesia mencapai Rp407,23 miliar, atau 13,98% dari target anggaran pendapatan tahun 2022. Realisasi pendapatan secara kumulatif dari Januari hingga Maret 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp442,06 miliar. Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah daerah hingga Maret 2022 mencapai Rp174,51 miliar atau 5,77% dari total anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah tahun 2022. Realisasi belanja pemerintah Januari-Maret 2022 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2021, yakni Rp131,80 miliar.

Beberapa studi empiris telah menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan belanja barang dan jasa dengan dinamika perekonomian nasional atau regional. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Gosal dkk. (2022) di Kota Manado pada tahun 2005 hingga 2021 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah atau kebijakan anggaran secara empiris berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan regional. Dalam model hubungan kausalitas, pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Pengaruh ini teridentifikasi baik secara parsial maupun simultan. Belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja barang dan jasa memiliki pengaruh negatif signifikan. Meskipun menunjukkan arah pengaruh yang berbeda secara individu, namun secara simultan, belanja modal dan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Manado.

Nurias dkk. (2023) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia, sedangkan tingkat pengangguran dan tenaga kerja informal di sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan. Kebijakan pemerintah, terutama pengeluaran pemerintah, telah berkontribusi dengan baik dalam mengurangi

kemiskinan, tetapi pemerintah harus memperhatikan integrasi program pengeluaran dengan program lainnya.

Dewi dan Suputra (2017) mengungkapkan fenomena yang berbeda mengenai penelitian serupa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Sementara itu, dana alokasi umum dan belanja modal tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. (Santosa (2013), dalam penelitian yang sama, menemukan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia. Namun, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terbukti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, penelitian ini menemukan fakta empiris bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil hanya berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan daerah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan hasil penelitian yang bervariasi mengenai kebijakan desentralisasi fiskal mengindikasikan masih adanya research gap. Untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut, penelitian ini mengkaji tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, dimana kebijakan-kebijakan tersebut harus berdampak langsung pada daerah. Penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan indikator-indikator yang tepat untuk lebih menjelaskan apakah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang diimplementasikan benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara teoritis dan empiris. Misalnya, mengacu pada penelitian yang dilakukan di 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura (Abdullah & Rusdarti, 2017), di 25 provinsi di Indonesia (Sijabat, 2017), di Afrika Timur (Gisore, dkk. 2014), dan negara OKI (Sudarsono, 2010). Dengan menggunakan metode regresi data panel, hasil keempat penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif belanja pemerintah secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja pemerintah merupakan cerminan program dan aktivitas pemerintah. Dalam mengalokasikan belanja, pemerintah daerah di Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah menerapkan *money follows function*. Dalam perencanaan pembangunan, setiap pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perencanaan pembangunan yang baik oleh daerah akan membantu pemerintah daerah tersebut untuk mengalokasikan belanja dengan tepat, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

Seperti diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung antara Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan belanja barang/jasa pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian deskriptif biasa digunakan pada penelitian yang menjelaskan suatu peristiwa tertentu. Penelitian lain oleh Sukmadinata (2005) menyimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berlaku, proses yang sedang berlangsung, akibat yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung. Dari kedua definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena-fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada dan pendapat yang berlaku, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk mengatasi masalah secara akurat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang meliputi data-data sebagai berikut: Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022; data Pengeluaran Pemerintah Indonesia untuk 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022; data Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022; data Belanja Barang dan Jasa Pemerintah untuk 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

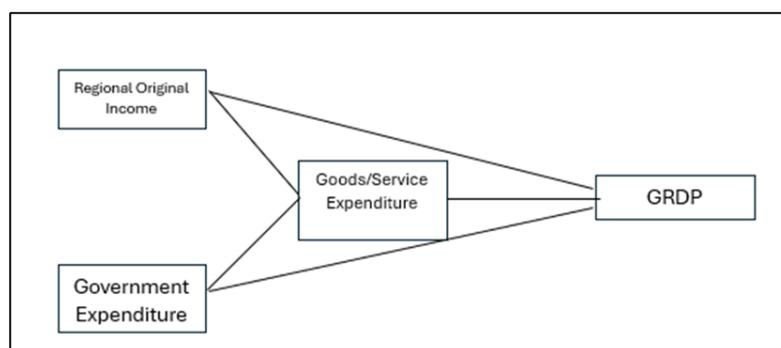
Definisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang dianggap lebih baik selama periode tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam satuan jutaan rupiah. Belanja Barang dan Jasa Pemerintah adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam program dan kegiatan pemerintah. Data yang digunakan adalah data belanja barang dan jasa pemerintah untuk 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dalam satuan jutaan rupiah. Belanja Pemerintah Daerah adalah semua

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Data yang digunakan adalah data belanja pemerintah daerah untuk 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dalam jutaan rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Data yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dalam jutaan rupiah.

Variabel-variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel Independen (Y) adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB), variabel independen terdiri dari (X1) adalah pendapatan asli daerah, (X2) adalah belanja atau pengeluaran pemerintah, (X3) adalah belanja barang dan jasa (lihat 1 model penelitian), dimana X3 sebagai variabelintervening. Saat menguji pengaruh variabel pendapatan daerah (X1) dan variabel belanja atau pengeluaran pemerintah (X2) terhadap variabel belanja barang dan jasa (X3), maka variabel X3 diubah menjadi variabel Y pertama (lihat gambar 2 submodel pertama). Kemudian saat menguji pengaruh variabel pendapatan daerah (X1), variabel belanja atau pengeluaran pemerintah (X2), dan variabel belanja barang dan jasa (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) maka variabel belanja barang dan jasa yang sebelumnya sebagai dependen (Y) diubah menjadi variabel X3 (lihat gambar3 submodel kedua).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi panel dan analisis Sobel untuk menghasilkan 3 sub model regresi dalam model penelitian. Gambaran model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.

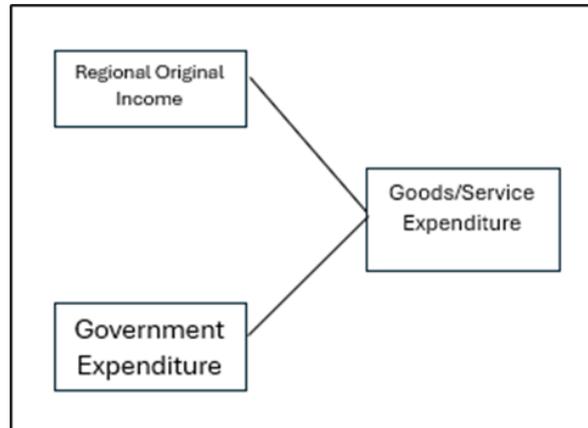
**Gambar 1 Model Penelitian**



Gambar di atas menggambarkan hubungan antara variabel pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB, dengan variabel belanja barang/jasa sebagai variabel

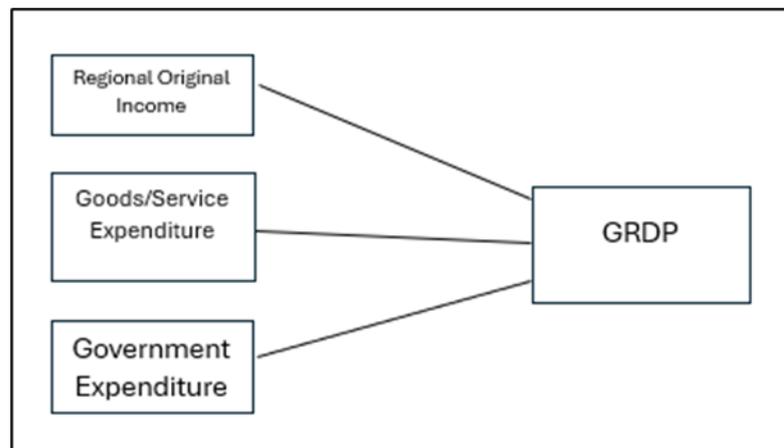
intervening di sisi kiri. Berdasarkan model di atas, penulis membagi model tersebut menjadi dua sub-model, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

**Gambar 2 Submodel Pertama**



Sub-model pertama menggambarkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap variabel Belanja Barang dan Jasa Indonesia. Syofya & Gustomi (2020) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja barang dan jasa di Kabupaten Kerinci dari tahun 2009-2016.

**Gambar 3 Submodel kedua**



Sub-model regresi kedua akan menggambarkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah, dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Perekonomian di Indonesia. Menurut Husen dan Sun'an (2018), Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, studi empiris yang dilakukan oleh Azwar (2016) menemukan bahwa perubahan nilai riil pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Respon positif perekonomian ini terjadi

secara cepat dan berlanjut dalam jangka panjang secara permanen, dimana 91,12% variasi pembentukan indikator perekonomian Indonesia pada akhir periode penelitian berasal dari sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sebaliknya pengadaan barang/jasa pemerintah dipengaruhi secara positif oleh kondisi perekonomian Indonesia. Namun, dampak positif ini tidak bersifat permanen. Dalam jangka panjang, perubahan dalam perekonomian akan merugikan pengadaan barang/jasa pemerintah. Respon negatif ini terus berlanjut dengan tren yang meningkat dalam jangka panjang.

Hasil analisis regresi dari kedua model tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji Sobel. Uji Sobel adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mediator menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini digunakan dalam penelitian ilmiah untuk menentukan apakah suatu mediator memediasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel mediator adalah Belanja Barang dan Jasa.

Hipotesis penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan kerangka konseptual. Hipotesis untuk hubungan antara PAD dengan PDRB yang dimediasi oleh Belanja Barang dan Jasa adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) melalui Belanja Barang dan Jasa, dan hipotesis untuk hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB yang dimediasi oleh Belanja Barang dan Jasa adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) melalui Belanja Barang dan Jasa.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren yang beragam namun cenderung meningkat. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17% pada tahun 2018, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan peningkatan investasi. Pada tahun 2019, pertumbuhan PDB mencapai 5,02%, sedikit melambat dari tahun sebelumnya, tetapi tetap stabil berkat konsumsi domestik yang tinggi. Situasi yang berbeda terjadi pada tahun 2020 ketika ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pulih di angka 3,70% pada tahun 2021, seiring dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi dan program vaksinasi. Pada tahun 2022, ekonomi Indonesia kembali menguat dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,31%, didukung oleh pemulihan sektor-sektor utama dan peningkatan ekspor. Secara keseluruhan, meskipun pandemi memberikan dampak yang cukup

signifikan, perekonomian Indonesia mampu bangkit kembali dengan kuat di tahun-tahun berikutnya.

Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah, dan variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih model regresi yang paling tepat untuk menghasilkan estimasi yang akurat. Proses pemilihan ini dilakukan dalam dua tahap:

### **Tahap 1: CEM vs FEM**

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar ( $p\text{-value} = 0,0000$ ), yang menunjukkan bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) dari model efek standar ditolak, yang mengimplikasikan adanya heterogenitas individu dalam model. Hal ini didukung lebih lanjut oleh nilai  $p\text{-value}$  sebesar ( $p\text{-value} = 0,000$ ), yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Ketika terdapat heterogenitas individu dalam model, maka FEM diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan CEM.

### **Tahap 2: FEM vs. REM**

Setelah mengidentifikasi model terbaik pada Tahap 1, langkah selanjutnya adalah membandingkan FEM dan model efek acak dengan menggunakan uji Hausman. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas acak Cross-section kurang dari 0,05 untuk submodel 1, yang mengarah pada penolakan  $H_0$ . Sebaliknya, untuk submodel 2, nilai probabilitas acak Cross-section melebihi 0,05, yang mengarah pada penerimaan  $H_0$ . Temuan dari uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model regresi yang paling tepat untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah, dan variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. FEM secara efektif memperhitungkan heterogenitas individu dan memberikan estimasi yang lebih kuat dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM).

### **Hasil Uji Submodel Pertama**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji  $t$ ) dan uji simultan (uji  $F$ ) dapat diketahui bahwa nilai  $p\text{-value}$  (0,000) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 baik untuk variabel pendapatan asli daerah maupun variabel belanja pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa baik variabel pendapatan asli daerah maupun variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja barang dan jasa pemerintah, baik secara individu maupun secara simultan.

Selanjutnya, nilai koefisien determinasi ( $R\text{-squared}$ ) sebesar 0,725 menunjukkan bahwa variabel PAD dan belanja pemerintah dapat menjelaskan 72,5% dari variasi belanja barang

dan jasa pemerintah. Sisanya sebesar 27,5% disebabkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Model regresi yang terbentuk adalah  $\text{Belanja Barang/Jasa} = 181.26 + 0.106 * \text{ROI} + 0.243 * \text{Belanja Pemerintah} + [\text{CX}=\text{F}]$

Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam menyediakan layanan publik yang penting bagi warganya. Komitmen ini terlihat dari upaya negara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan belanja barang dan jasa pemerintah. Sebab PAD merupakan sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk memberikan layanan penting dan proyek-proyek infrastruktur. Pada tahun 2022, Indonesia mengalami peningkatan PAD sebesar 14,8%, mencapai Rp. 191.136.247.640.000,-, dibandingkan dengan Rp. 166.453.445.326.000,- pada tahun 2021. Pertumbuhan ini merupakan bukti dedikasi yang tak tergoyahkan dari pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan, memperkuat stabilitas keuangan negara dan kemampuannya untuk menyediakan layanan-layanan penting.

Selain meningkatkan PAD, pemerintah Indonesia juga memprioritaskan pemanfaatan belanja barang dan jasa pemerintah yang efisien. Pada tahun 2022, belanja barang dan jasa pemerintah mencapai Rp. 98.815.645.704.704,-, yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Penggunaan dana publik yang bertanggung jawab ini mendukung layanan publik dan pembangunan infrastruktur, meyakinkan warga dan pembuat kebijakan.

Analisis empiris menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dan belanja barang dan jasa pemerintah. Koefisien sebesar 0,1963 mengindikasikan bahwa kenaikan satu persen pada belanja pemerintah akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,1963 persen pada belanja barang dan jasa pemerintah, dengan menganggap variabel lain konstan..

Upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan PAD dan mengoptimalkan belanja barang dan jasa pemerintah menggarisbawahi komitmennya untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas bagi warganya. Dengan mengelola pendapatan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif, Pemerintah meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan standar hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Hasil Uji Submodel Kedua**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk menyelidiki hubungan antara pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah (PAD), belanja barang dan jasa, dan pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan belanja barang

dan jasa memiliki dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.

Hasil uji parsial (t-test) dan uji simultan (F-test) menunjukkan bahwa variabel PAD dan Belanja Barang dan Jasa memiliki nilai p-value sebesar 0,000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, dan koefisien yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB). Di sisi lain, variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai p-value sebesar 0,03 (p-value < 0,05) dan nilai konstanta yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap variabel PDRB.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD, Pengeluaran Pemerintah Daerah, dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap PDRB, baik secara individu maupun simultan. Nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,995 menunjukkan bahwa variabel PAD, Pengeluaran Pemerintah, dan Belanja Barang dan Jasa dapat menjelaskan 99,5% variasi PDRB. Sisanya sebesar 0,5% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Model regresi yang terbentuk adalah  $PDRB = 287037.6 + 11.458 * ROI - 4.154 * Belanja\ Pemerintah. + 77.178 * G/S\ Pengeluaran + [CX=F]$

PAD dan belanja barang dan jasa memiliki dampak positif signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji simultan ketiga variabel pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah, dan belanja barang dan jasa secara statistik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai R-squared sebesar 0,995 menunjukkan bahwa model menjelaskan 99,5% dari variasi pertumbuhan ekonomi. Sisanya, 0,5% disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model.

Koefisien regresi sebesar -4,153835 untuk pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa kenaikan satu unit dapat menyebabkan penurunan PDRB sebesar -4,153835, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Hasil yang tampaknya berlawanan dengan intuisi ini dapat dikaitkan dengan alokasi belanja pemerintah yang tidak efisien, terutama selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 dan langkah-langkah karantina wilayah (*lockdown*) yang terkait mengharuskan adanya pergeseran prioritas belanja pemerintah ke program bantuan sosial, yang berpotensi mengalihkan sumber daya dari investasi produktif. Realokasi dana ini

dapat menjelaskan hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang diamati selama pandemi.

Studi ini menyoroti peran penting PAD dan pemanfaatan belanja barang dan jasa yang efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun pengeluaran pemerintah dapat mendukung, efektivitasnya bergantung pada alokasi yang bijaksana dan keselarasan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Pandemi COVID-19 menjadi pengingat akan pentingnya mengadaptasi strategi anggaran untuk mengatasi tantangan yang tidak terduga dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam masa pandemi dimana tekanan ekonomi cukup tinggi, indikator pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya dilihat dari sisi kontribusi ekonomi, namun perlu diukur dari sisi *well being*, atau kesejahteraan yang tetap stabil (Murtin, dkk,2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, yang menekankan peran akumulasi modal dan kemajuan teknologi dalam mendorong kemajuan ekonomi. Selain itu, temuan ini mendukung gagasan bahwa pemanfaatan PAD yang efisien serta belanja barang dan jasa dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Anitasari dan Soleh (2015) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Nurlina (2015) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2004-2013 menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran pemerintah. Waryanto (2017) dengan menggunakan data time series 1990 s.d 2015 menemukan belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Siregar (2019), yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Djyanthi dan Juniarti (2020) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah DKI Jakarta. Yasin (2020) menemukan bahwa PAD dan belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Timur. Hasanah & Handayani (2021) menemukan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2018. Amal,dkk (2021) menemukan PAD, Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. Widyasari, dkk (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi PAD, belanja modal dan SiLPA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional pada Kabupaten/Kota di

Jawa Tengah tahun 2019-2021. Kermite, dkk, (2023) menemukan bahwa bahwa belanja pemerintah yang terdiri dari belanja modal dan belanja operasional secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara selama pandemi Covid-19.

### **Hasil Uji Sobel**

Pengujian ini menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) melalui Belanja Barang dan Jasa sebagai variabel mediasi.

**Tabel. 1 Hasil Uji Sobel**

Variabel	t value	t tabel
Pendapatan Asli Daerah	5.165	1.974
Belanja Pemerintah	6.881	1.974

**Sumber: Hasil olahan**

Hasil uji Sobel menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa baik variabel PAD maupun variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB melalui Belanja Barang dan Jasa sebagai variabel mediasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan Pengeluaran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui variabel Belanja Barang dan Jasa Pemerintah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kondisi Perekonomian di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. PAD merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi pada infrastruktur, menyediakan layanan dasar, dan menstimulasi aktivitas ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi lebih lanjut terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mendukung program-program pekerjaan umum, pendidikan, dan sosial jika dialokasikan secara efektif.

Peran Mediasi Belanja Barang dan Jasa. Belanja barang dan jasa memediasi secara parsial dampak PAD dan belanja pemerintah daerah terhadap kondisi perekonomian. Hal ini

mengimplikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya yang efisien yang dialokasikan untuk barang dan jasa, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial, memainkan peran penting dalam menerjemahkan PAD dan pengeluaran pemerintah menjadi manfaat ekonomi yang nyata.

Variasi Regional dalam Sensitivitas Ekonomi. Daerah-daerah yang terletak di pulau Jawa menunjukkan tingkat sensitivitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran Jawa yang relatif lebih tinggi untuk barang dan jasa pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan alokasi sumber daya yang efisien untuk barang dan jasa lebih mungkin mengalami hasil ekonomi yang positif. Pemerintah harus memprioritaskan strategi untuk meningkatkan pengumpulan PAD melalui perpajakan yang efektif dan praktik manajemen pendapatan. Hal ini akan menyediakan sumber daya keuangan untuk mendukung investasi penting dan inisiatif pembangunan ekonomi.

Pemerintah harus mengadopsi mekanisme penganggaran dan pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan efektif, memprioritaskan investasi produktif di bidang infrastruktur, pendidikan, dan program-program sosial dapat memaksimalkan dampak ekonomi dari pengeluaran pemerintah. Para pembuat kebijakan harus menerapkan intervensi yang ditargetkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi regional, terutama di daerah-daerah yang memiliki belanja barang dan jasa pemerintah yang lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan dukungan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah di daerah-daerah tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami berterima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yang telah mengizinkan kami mengakses data yang diperlukan untuk penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Mahmoud Ahmed., & Rusdarti. 2017. The Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Journal of Economic Education*. 6(1), 11-18. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec/article/view/14396>
- Amal, A., Semmaila, B., & Zakaria, J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*. 4(3), 542–551. <https://Doi.Org/10.33096/Paradoks.V4i3.853>

Anitasari, Merri., & Soleh, Ahmad. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. 3(2).

<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/139>

Azwar, A. 2016. Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*. 20 (2), 149–167.

<https://doi.org/10.31685/KEK.V20I2.186>

Bank Indonesia. 2024. *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Retrieved June 22.

<https://lpi.co.id/>

Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 18, 1745–1773.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/21642>

Djayanti, M.R., & Juniarti. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Tesis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.

[http://repository.stei.ac.id/2548/1/11150000511\\_Artikel%20Indonesia\\_2020..pdf](http://repository.stei.ac.id/2548/1/11150000511_Artikel%20Indonesia_2020..pdf)

Gisore, Naftaly., Kipro, Symon., Kalio, Aquilars., dan Ochieng, James. (2014). Effect of Government Expenditure on Economic Growth in East Africa: A Disaggregated Model. *European Journal of Business and Social Sciences*, 3 (8), 289-304.

<https://pdfs.semanticscholar.org/31a8/ef8290e5ef0306fd28ebb364268a558df9cb.pdf>

Gosal, J. S., Lutherani, A., Lopian, C. P., Masloman, I. 2022. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado Tahun 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 22(5), 85–96.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/42453>

Hasanah, S., & Handayani, N. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 10(8), 1–19.

<http://Jurnalmahasiswa.Stiesia.Ac.Id/Index.Php/Jira/Article/View/4134>

Husen, A., & Sunan, M. 2018. Efek Dari Pendapatan Regional Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEPA)*. 6(2), 21–41.

<https://doi.org/10.60201/JEPA.V6I2.1146>

IMF. 2023. *World Economic Outlook (Januari 2023)-GDP, current prices*.

<https://www.imf.org/external/datamapper/PPPGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>

Kermite, Geraldo Marcellino., Kumenaung, Anderson G., Tolosang, Krest D. 2023. Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara selama Pandemic Covid-19. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 23 No.7 Agustus 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Murtin, Fabrice., Siegerink, Vincent., Fleischer, Lara., Bonnet, Julien., Egert, Balázs. 2022. Well-Being Analytics For Policy Use: Policy Evaluation Through A Well-Being Lens In Slovenia. *OECD Papers On Well-Being And Inequalities Working Paper*. No.07.

<https://doi.org/10.1787/9ca973f1-en>

Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. 2023. Reducing the provincial poverty rate in Indonesia: The impact of local government expenditure. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. 24 (2), 297–315. <https://doi.org/10.18196/JESP.V24I2.18618>

Nurlina. 2015. The Effect of Government Expenditures on Indonesia Economic Growth. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*. 18 (1), 1-14.

<http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v18i1.377>

Santosa, B. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*. 5(2), 130–143.

<https://scholar.google.co.id/citations?user=E44O9ToAAAAJ&hl=en>

Siregar, E. A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*. 1(2), 160-170. <https://doi.org/10.22303/ACCUMULATED.1.2.2019.160-170>

Sijabat, Rosdiana. 2017. Do Productive Government Expenditures Affect Economic Growth? Evidence from Provincial Governments across Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*

*(Journal of Government & Politics)*. 18 (1), 1-47.

<https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/2662>

Sudarsono, Heri. 2010. The Relationship Between Economic Growth and Government Spending: A Case Study of OIC Countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 11(2), 149-159. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i2.322>

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.

Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya.

Syofya, Heppi, Gustomi., & Hendra. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Barang Dan Jasa Di Pemerintahan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. 17(1), 72–78. <https://doi.org/10.31849/JIEB.V17I1.3255>

Waryanto, Puput. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*. Vol.2 No.1, 2017, Hal. 35-55. <https://www.researchgate.net/publication/329650554>.

Widyasari, Kartika., Dirgantari,Novi., Wahyuni, Sri., Wibowo, Hardiyanto.2023. Faktor Faktor Determinant Pertumbuhan Ekonomi Regional Pada Masa Pandemi Di Jawa Tengah Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 7 Nomor 2, April 2023. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1322>

Yasin, Muhammad. 2020. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal Of Economic, Bussines And Accounting (Costing)*. 3(2), 465–472. <https://Doi.Org/10.31539/Costing.V3i2.1161>